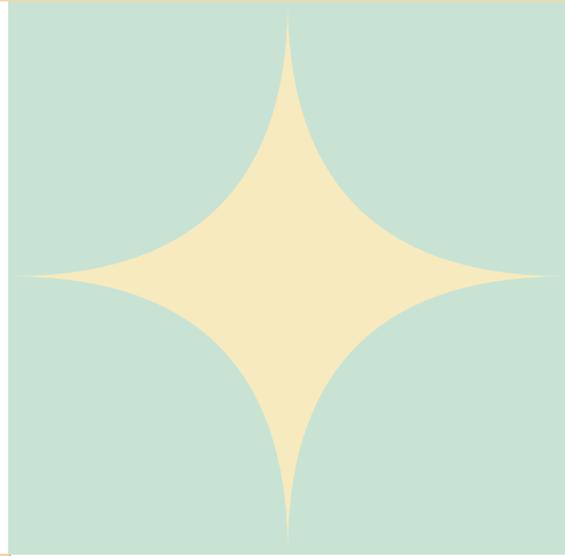


**STANDAR
DATA
STATISTIK
NASIONAL
2021**





KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

Peraturan Presiden No. 38 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia
(SDI)

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

PRINSIP SATU DATA INDONESIA



Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Pasal 3
Tentang Satu Data Indonesia



Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:



Memenuhi **Standar Data**



Memiliki **Metadata**



Memenuhi kaidah **Interoperabilitas**



Menggunakan **Kode Referensi** dan
Data Induk





STANDAR DATA DAN STANDAR DATA STATISTIK

Peraturan BPS No. 4 Tahun 2021 Tentang
Standar Data Statistik Nasional

Standar Data

Standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari 5 komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.

Standar Data Statistik

Standar data yang mendasari data statistik

AMANAHAH Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019

Peraturan BPS No. 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik



Berisi tata kelola usulan baru/pemutakhiran SDS di instansi pusat dan/atau daerah, instrumen, tata cara, juga formulir yang harus di isi dan dilengkapi.



Peraturan BPS No. 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional (SDSN)

- Daftar Standar Data Statistik yang telah ditetapkan BPS tahun 2021.
- Merupakan update dari Perka BPS No. 126 Tahun 2020 Master File Standar Data Statistik (MFSDS).

TUJUAN DAN MANFAAT STANDAR DATA STATISTIK

Peraturan BPS No. 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

Tujuan

- Kemudahan dalam pengumpulan, berbagipakai, dan integrasi data
- Kemudahan dalam penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa

Manfaat

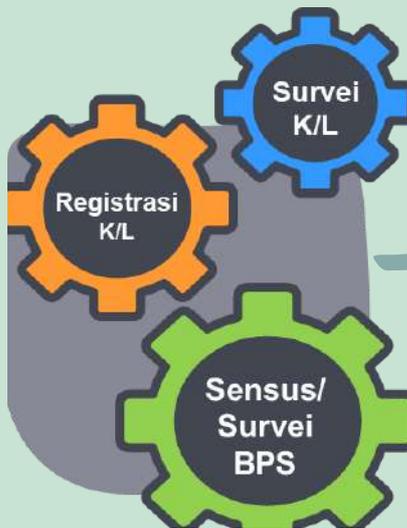
- Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standardisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi
- Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data Statistik dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah



AZAS PEMBENTUKAN STANDAR DATA STATISTIK



PENYUSUN STANDAR DATA DAN KOMPONENNYA



KONSEP

Merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi



DEFINISI

Merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain



KLASIFIKASI

Merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas



UKURAN

Merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan



SATUAN

Merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan



**Konsistensi
Metadata**



KETERKAITAN

STANDAR DATA DAN METADATA



STANDAR DATA:

- Konsep
- Definisi
- Klasifikasi
- Ukuran
- Satuan

METADATA:

1. Metadata Kegiatan
 - Konsep
 - Definisi
 - Klasifikasi
 - Ukuran
 - Satuan
2. Metadata Indikator
 - Konsep
 - Definisi
3. Metadata Variabel
 - Konsep
 - Definisi

Metadata = Standar Data



Data tersebut sudah memenuhi standar dan layak untuk dibagipakaikan kepada instansi lain

PERBEDAAN STANDAR DATA STATISTIK **LINTAS** DAN **TIDAK LINTAS** INSTANSI

	SDS Lintas Instansi	SDS Tidak Lintas Instansi
Definisi	Standar data statistik yang berlaku lintas kementerian/lembaga/dinas/instansi	Standar data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya
Penetapan	Oleh Pembina Data Statistik	Oleh K/L Pusat
Bentuk Penetapan	Peraturan Badan Pusat Statistik	Produk Hukum yang ditandatangani Pimpinan Tinggi K/L Pusat
Penggunaan	Semua K/L/D/I Pusat maupun Daerah	K/L Tertentu dan Dinas/Instansi binaannya
Contoh Penggunaan	Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sensus Penduduk 2020, Daerah Dalam Angka	Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Kepuasan Layanan

Pembentukan SDS Kementerian/Lembaga

Identifikasi Data
(form/e-form, kuesioner,
lembar kerja excel, list,
dan sebagainya)

Pisahkan antara Data
Lintas Instansi dan Data
Tidak Lintas Instansi

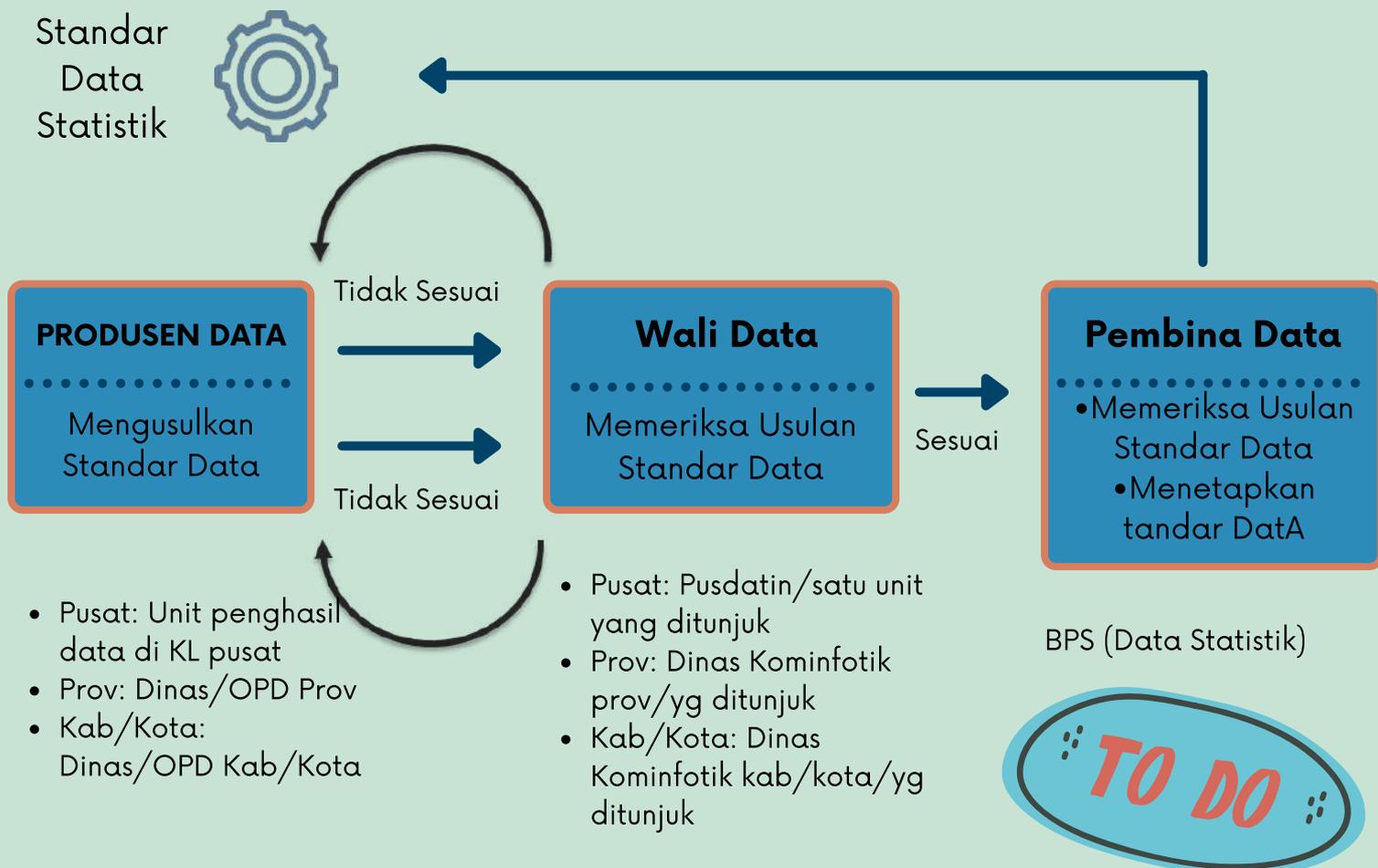
Perhatikan perbedaan
antara konsep, variabel,
dan indikator

PENGERTIAN KONSEP, VARIABEL, DAN INDIKATOR

Konsep	Variabel	Indikator
Ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi	Suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada kegiatan statistik	Variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan
Gambaran mental atau persepsi yang merangkum gagasan, pengamatan, atau perasaan yang mirip	Variabel = Konsep yang dapat diukur; Karakteristik atau gejala yang dapat memiliki nilai yang berbeda-beda	Suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Contoh; berat badan bayi berdasarkan umur merupakan indikator terhadap status gizi bayi tersebut
Misalnya konsep tentang kecantikan, kekayaan, kecemerlangan, pendidikan	Misalnya jumlah orang, besarnya anggaran, jumlah peralatan	Misalnya, untuk mengukur kekuasaan, dapat digunakan (1) jumlah orang dibawah pengawasan seseorang (2) besarnya anggaran tahunan (3) jumlah peralatan yang diawasi



Pelaku dan Peran Dalam Pembentukan Standar Data Statistik



FORMULIR SDS

PENGAJUAN USULAN SDS

						
BADAN PUSAT STATISTIK						
FORMULIR PENGAJUAN						
USULAN STANDAR DATA STATISTIK						
I Identifikasi Penyelenggara Kegiatan						
Nama Instansi Pemerintah	:					
Alamat Lengkap Instansi	:					
Kabupaten/Kota	:					
Provinsi	:					
II Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person)						
Nama Penanggung Jawab	:					
Jabatan	:					
Telepon/Fax	:					
Email	:					
III Deskripsi Singkat kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan						

PENGAJUAN USULAN BARU

FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

Nama Instansi Pemerintah	:					
Direktorat	:					
Subdirektorat	:					
No.	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan

PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN

FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK

Nama Instansi Pemerintah	:						
Direktorat	:						
Subdirektorat	:						
No.	ID Standar Data yang Dimutakhirkan	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan

CONTOH FORMULIR SDS

PENGAJUAN USULAN SDS

	
Badan Pusat Statistik Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Statistik	
I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan	
Nama Instansi Pemerintah	: Kementerian Dalam Negeri
Alamat Lengkap Instansi	: Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, RT.5/RW.2 Gambir, Kecam
Kabupaten/Kota	: Jakarta Pusat
Provinsi	: DKI Jakarta
II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person)	
Nama Penanggung Jawab	: Fulan
Jabatan	: Kepala Seksi Standar Data
Telepon/Fax	: 085725263947
Email	: fulan@muslim.com
III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik yang Akan Dilakukan	
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain	

PENGAJUAN USULAN BARU

FORMULIR PENGAJUAN BARU STANDAR DATA STATISTIK						
Nama Instansi Pemerintah	: Badan Pusat Statistik					
Direktorat	: Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei					
Subdirektorat	:					
No.	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	Penduduk	Orang yang menjadi residen di negara dimana mereka punya hubungan kuat dengan mana mereka membentuk pusat kependudukan ekonomi yang dominan selama satu tahun atau lebih.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen	System National Account 2008

PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN

FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK							
Nama Instansi Pemerintah	: Badan Pusat Statistik						
Direktorat	: Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei						
Subdirektorat	:						
No.	ID Standar Data yang Dimutakhirkan	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	SD00282.00.00	Penduduk	Warga negara Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013

STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL (SDSN)

(PERBAN BPS NO. 4 TAHUN 2021)



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL

Pasal 2

Standar Data Statistik Nasional digunakan sebagai salah satu rujukan dan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Kegiatan Statistik.

Pasal 3

Standar Data Statistik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

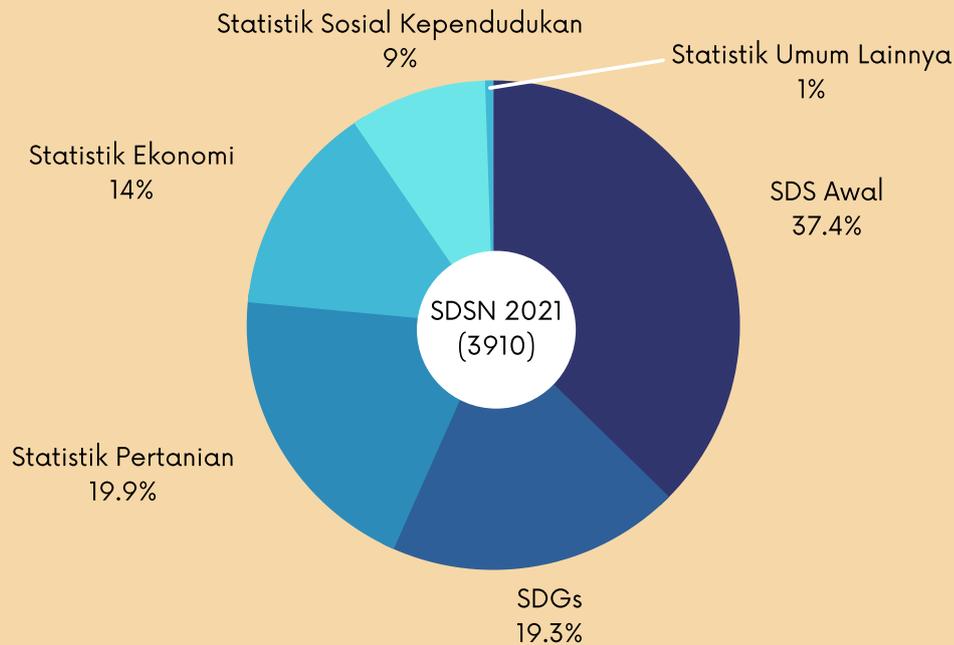
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB II

STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL

No	Kode SDSN	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	SD00562.02.00	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	Garis kemiskinan nasional	Sejumlah uang yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan data pengeluaran/konsumsi terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan yaitu harga dari 2,100 kkal/kapita/hari ditambah dengan Garis Kemiskinan non-makanan yang dihitung dengan metode budget share dari komoditas dalam keranjang non-makanan terhadap kelompok komoditas non-makanan yang dikumpulkan Susenas modul konsumsi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah

REKAP STANDAR DATA STATISTIK 2021



Jan - Mar

- Briefing SM & K/L Target
- Penerimaan Usulan SDS dari SM BPS dan K/L Target sesuai Data Prioritas
- Penerimaan Usulan SDS terkait Revisi SDGs Edisi 2 Bappenas
- Cleaning dan Reviu Internal

Apr - Jun

- Rapat & Konfirmasi:
 1. SM BPS
 2. K/L Target dan terkait
 3. Bappenas terkait Revisi SDGs Edisi 2
- Cleaning dan Reviu Internal

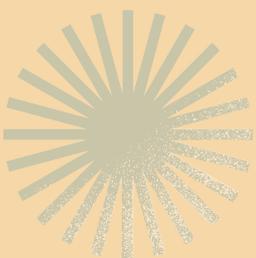
Jul - Ags

- Uji Publik dan Harmonisasi Draft Perban SDS
- Persetujuan Setkab
- Penerbitan Perban SDS

Sep - Des

- Sosialisasi SDS Nasional 2022

RENCANA PENYUSUNAN SDSN 2022



SDSN Tahun 2022

"Agar usulan Standar Data Statistik bisa ikut dalam penetapan tahun 2022 maka proses usulan, pemutakhiran dan pembahasan harus sudah selesai maksimal Juni 2022"





DATA MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Fungsi Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik

- 🏠 Kantor Badan Pusat Statistik RI (Gedung 2 Lt. 4)
Jalan Dr. Sutomo No. 6-8, Ps. Baru, Kec. Sawah Besar,
Jakarta Pusat 10710
- ✉️ baku@bps.go.id